

# WNI

## Penyampaian Pertanggungjawaban LKPJ Bupati Mesuji Tahun Anggaran 2022

Updates. - [MESUJI.WNI.OR.ID](https://MESUJI.WNI.OR.ID)

Aug 1, 2023 - 21:10



*Pj Bupati Mesuji Sulpakar Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2022*

MESUJI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mesuji menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Mesuji akhir tahun anggaran 2022 di Ruang Rapat Gedung DPRD Kabupaten Mesuji, Desa Wiralaga Mulya, Kecamatan Mesuji, Senin (03/04/23).



Rapat paripurna dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Mesuji Elfianah, Asisten, PJ Bupati Mesuji Sulpakar, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, perwakilan Polres Mesuji, perwakilan Dandim 0426 Tuba, Camat dan tamu undangan lainnya.

Bupati Mesuji mengatakan, penyampaian LKPJ Tahun Anggaran 2022 ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 dan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 13 tahun 2019.

Sedangkan penyampaian laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2022 terkait arah kebijakan Umum Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun anggaran 2022 mengacu kepada peraturan daerah Kabupaten Mesuji Nomor 11 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mesuji tahun [2017-2022](#) yang memuat visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mesuji.

Visi dan misi tersebut dijabarkan dalam berbagai strategi kebijakan dan prioritas daerah yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan yang dilaksanakan selama 1 tahun anggaran yang disusun dalam buku laporan keterangan pertanggungjawaban yang telah disampaikan.



Pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Mesuji berpedoman kepada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah peraturan tersebut menitikberatkan pada pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien yang diselenggarakan melalui data kelola pemerintahan yang baik dengan tiga pilar utama yaitu transparansi akuntabilitas dan partisipatif

Untuk itu, berikut disampaikan secara ringkas hasil perhitungan anggaran dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten di tahun anggaran 2022.

Dilaporkan realisasi pendapatan daerah tahun 2022 adalah Rp862,3 miliar atau sebesar 94,90% target yang ditetapkan sebesar Rp908,7 miliar.

Pada tahun anggaran 2022 target belanja sebesar Rp975,5 miliar dan terealisasi sebesar Rp879,3 miliar atau mencapai 90.14%.



Dalam rangka pencapaian visi Kabupaten Mesuji Pemerintah Kabupaten Mesuji menitikberatkan pada penguatan infrastruktur dan peningkatan nilai tambah produk unggulan dalam rangka pemulihan ekonomi daerah.

Pada bidang infrastruktur dasar sesuai undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan dan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pemerintah Kabupaten Mesuji mengutamakan pembangunan jalan yang meliputi rekonstruksi jalan sepanjang [15.455](#) km dan pemeliharaan berkala jalan 5,61 km serta pemeliharaan rutin jalan sepanjang 245,67 kilometer.

Hal ini telah membuahkan hasil terhadap aksesibilitas pada 105 desa yang ada di Kabupaten Mesuji saat ini seluruh desa di Kabupaten Mesuji telah dapat diakses melalui jalur darat maupun jalur air meskipun patut kita sadari bahwa untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi tersebut masih banyak yang harus kita lakukan bersama mengingat kondisi tanah yang masih labil dan bergambut sedangkan mobilitas masyarakat yang begitu tinggi guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

Di bidang kesehatan, berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2016 tentang pengguna dana kapitasi jaminan kesehatan nasional. (Rilis/Udin)